

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konflik etnis terutama yang melibatkan Etnis Rohingya pada kenyataannya bukan merupakan hal baru di Negara Bagian Arakan, Myanmar. *Irish Centre for Human Rights* dalam laporannya menyebutkan bahwa konflik atau dalam bahasa mereka, pengusiran paksa terhadap Etnis Rohingya yang terdokumentasikan sebelumnya juga pernah dilakukan oleh Pemerintah Myanmar sebanyak dua kali, yakni pada bulan Februari 1978 dan pada bulan Mei 1991 hingga Maret 1992 (Burma 91:2010). Sementara konflik yang terjadi pada tahun 2012 terjadi sebanyak dua kali, yakni pada bulan Juni dan terulang kembali pada bulan oktober.

Pada Oktober 2012, konflik kembali terjadi. Dalam gelombang kedua ini, serangan yang dilakukan oleh Etnis Arakan bersama militer Myanmar terhadap komunitas muslim. lebih terkoordinasi dan tersusun rapi. Laporan resmi pemerintah Myanmar menyebutkan bahwa selama konflik kedua berlangsung, terhitung sejak 21-30 oktober, 89 orang meninggal dunia, 136 terluka, dan 5351 tempat tinggal dihancurkan (Myanmar 1:2012). Terkait konflik ini, Natalie Brinham dalam artikelnya menyebutkan bahwa 36.000 Muslim dipaksa keluar dari Myanmar menuju Bangladesh (Brinham 40:2005).

Perlakuan diskriminatif terhadap Etnis Rohingya seperti yang terlihat dari beberapa contoh kasus yang terdokumentasikan di atas antara lain disebabkan oleh status mereka yang berbeda. Tidak seperti etnis lain, Etnis Rohingya tidak diakui

sebagai warga negara oleh pemerintah Myanmar melainkan sebagai pendatang ilegal.

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap Etnis Rohingya, seperti tidak diberikan izin usaha, pengenaan pajak yang tinggi dan berlebihan hanya kepada Etnis Rohingya, jika pajak tersebut tidak mampu dibayarkan, maka lahan pertanian, tambak, atau properti apapun yang mereka miliki akan disita, diperlukan izin untuk keluar dari otoritas lokal, khusus bagi Etnis Rohingya yang terkonsentrasi di Rakhine utara, mereka dimasukkan ke dalam kamp-kamp konsentrasi dan dieksploitasi sebagai pekerja paksa, tidak diberikan akses untuk mencicipi pendidikan, sulitnya mendapatkan izin perkawinan, pemerkosaan terhadap perempuan Rohingya, serta penahanan tanpa melalui proses peradilan (Lewa 4:2007).

Keprihatinan atas tragedi kemanusiaan yang dialami umat Islam Rohingya di Rakhine, Myanmar, terus mengalir deras. Desakan untuk menghentikan kekerasan terus digelorakan oleh berbagai komunitas dunia. Di antaranya, NU yang bekerja sama dengan pemerintah dan ormas keagamaan lainnya dalam wadah Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) yang juga terus menggalang dana untuk dikirimkan ke sana (Muntaha, 2017).

Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid (2017) mengatakan peristiwa yang dialami oleh warga Rohingya harus dilihat sebagai aksi kekerasan atas kemanusiaan. Pemerintah Myanmar, , maka harus segera dihentikan serangan militer terhadap warga Rohingya dan segera mengakuinya sebagai bagian yang terintegrasi dengan Myanmar. Oleh sebab itu, perlu ada upaya yang terintegrasi

antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam mencari penyelesaian yang substantif atas persoalan tersebut. Wahid Foundation meminta semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat sipil untuk bahu membahu menyatukan langkah guna mencari penyelesaian substantif masalah Rohingnya (Wahid, 2017).

Sebanyak sembilan organisasi masyarakat Islam membentuk Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar. Para tokoh dari 9 ormas Islam itu, menggalang bantuan kemanusiaan yang meliputi bantuan kesehatan, makanan dan perlindungan,” tutur Helmy Faishal Zainii, Sekjen PBNU. Selain NU, terdapat ormas Islam lain, seperti Muhammadiyah, Al-Irsyad, Mathlaul Anwar, Dewan Dakwah Islamiyah (DDI), Ikadi, MUI, Persatuan Islam (Persis), Hizbul Tahrir Indonesia (HTI). Mereka melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi. Sebagai perwujudan keprihatinan atas masalah kemanusiaan. Mereka melaksanakan misi bersama bantuan kemanusiaan untuk Myanmar dengan nama Indonesia Aid. Indonesia Aid merupakan kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat Indonesia dalam bantuan kemanusiaan untuk konflik Rohingya/Rakhine di Myanmar (Ahmad, 2017).

1.2 Rumusan Masalah

1. Mengapa Muncul Aksi kemanusiaan Ormas Islam Indonesia terhadap Krisis Kemanusiaan Rohingnya Tahun 2017?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Faktor penyebab terjadinya Aksi kemanusiaan Ormas Islam Indonesia terhadap Krisis Kemanusiaan Rohingnya Tahun 2017.

1.4 Landasan Teori

Landasan berasal dari kata “Dasar” yang artinya Melandasi, Teoritis berasal dari kata “Teori” yang berarti pendapat yang didasarkan pada Penelitian seseorang didukung oleh data, penyelidikan yang menghasilkan Fakta berdasarkan Ilmu Pengetahuan. Maka Landasar Teoritis adalah Hasil dari Penelitian yang sudah ada dan Fakta yang menjadi dasar pada Penelitian yang akan dilakukan. Landasan Teori pada Penelitian Aksi kemanusiaan Organisasi Islam Indonesia untuk Rohingnya adalah Teori Kemanusiaan yang meliputi: Definisi aksi kemanusiaan, Prinsip-prinsip aksi kemanusiaan yang meliputi prinsip kemanusiaan, netralitas, dan imparialitas (Wheeler 1:1997).

Landasan teori secara garis besar memuat teori yang terkait dengan variabel yang hendak diteliti. Peneliti punya kewajiban untuk membahas secara teoritik beragam variabel atau faktor yang terkait langsung dengan penelitian yang akan dilakukan. Beragam variabel itu tentu saja yang bersumber dari rumusan masalah yang perlu dibahas secara jelas dan mendalam. Kedudukan teori pada bagian ini adalah sebagai sarana atau alat untuk menganalisis variabel-variabelnya. Berangkat dari pembahasan beragam variabel yang terdapat dari penelitian secara teoritik, maka penelitian akan mampu memahami peta teori dari mana semua variabelnya. Peneliti juga bisa menyajikan teori yang berbeda atau bertentangan tetapi harus dibahas untuk menentukan yang relevan secara teoritik dengan penelitiannya. Artinya peneliti harus memilih dan menentukan teori yang hendak digunakan sebagai analisisnya (Maryono 2011:54).

4.1.1 Aksi Kemanusiaan

Kemanusiaan dalam bahasa Inggris biasa disebut “Humanitarian” , teori kemanusiaan berawal dari realitas yang menggambarkan sebuah solidaritas manusia dalam membantu mereka yang rentan dan menderita akibat konflik dan bencana alam. Ide solidaritas berawal dari keyakinan bahwa ‘kemanusiaan’ menjadi esensi yang melekat dalam setiap individu, sehingga tindakan untuk merespon tragedi kemanusiaan dianggap sebagai sesuatu yang ada dalam diri setiap manusia. Tindakan brutal yang dilakukan untuk melukai dan membunuh orang lain kemudian dilihat sebagai tindakan ‘tidak manusiawi’ (*inhuman*) dimana manusia dianggap telah kehilangan salah satu esensi dalam dirinya (Wheeler 1:1997).

Tindakan kemanusiaan dilakukan tanpa mempertimbangkan identitas kewarganegaraan atau etnis karena semua manusia dianggap harus diperlakukan secara sama. Prinsip kemanusiaan kemudian menjadi pondasi dasar *humanitarian action* yang kemudian disepakati oleh negara-negara melalui Konvensi Jenewa. Dalam konvensi ini terdapat tiga prinsip dasar dalam *humanitarian action*: prinsip kemanusiaan, netralitas, imparsialitas (Glover 28:2005).

Humanitarian action yang dilakukan oleh aktor non-negara kemudian didominasi oleh etos untuk melakukan tindakan baik, yang didasari oleh dua landasan moral, yaitu kecenderungan untuk menghormati martabat manusia serta perasaan simpati untuk merespon penderitaan manusia (Glover 29:2005). Partisipasi aktif untuk merespon krisis kemanusiaan ini menjadi bagian penting dari humanitarian action yang secara kuat memiliki budaya untuk melakukan tindakan cepat (Dijkzeul & Hilhorst 2:2005).

Humanitarian action kemudian dilihat sebagai tindakan imparsial dalam merespon krisis kemanusiaan akibat konflik/perang dan bencana alam yang juga meliputi perlindungan terhadap hak asasi manusia, akses kesehatan, pembangunan ekonomi, promosi terhadap demokrasi dan upaya membangun tanggung jawab negara (Barnett, 123:2005).

Sebagai sebuah ide dan dinamika dalam politik internasional, aksi kemanusiaan terjadi dalam konstelasi hubungan internasional yang kental akan tarik menarik kepentingan dan pengaruh antar negara. Hal ini menjadikan aksi kemanusiaan tidak lagi dapat dilihat secara apolitis dan netral. Pada dasarnya, kemanusiaan dan politik menjadi dua polar yang berseberangan dimana kemanusiaan memiliki *nature* sebagai non partisan dan non politik (Schimme 20:2006).

Meskipun begitu dalam banyak kasus, kemanusiaan dan politik menjadi tidak bisa dipisahkan satu sama lain sehingga menambah kompleksitas yang terjadi di lapangan (Schimme 20:2006). Beberapa contoh mengenai keterlibatan politik dalam aksi kemanusiaan diantaranya negosiasi atas akses kemanusiaan yang menjadi politis karena negara melibatkan kepentingan nasionalnya. Contohnya, akses terbatas yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar terhadap negara dan organisasi kemanusiaan yang akan memberikan bantuan terhadap pengungsi Rohingya di Negara Bagian Rakhine.

Akses merupakan ruang manuver bagi aktor kemanusiaan dalam memberikan bantuannya tanpa harus diliputi rasa takut akan serangan terhadap pekerjaan yang dilakukannya (Hilhorst & Jansen 25:2010). Manuel Bessler, *the Deputy Chief of the Policy Development and Studies Branch in the Office for the Coordination of*

Humanitarian Affairs (OCHA) menyatakan bahwa tanpa keamanan, aksi kemanusiaan tidak akan ada (*United Nations: New Protocol*). Penyerangan terhadap aksi kemanusiaan mencakup beberapa hal diantaranya: (a) aksi kekerasan terhadap pekerja kemanusiaan (b) bantuan kemanusiaan dan (c) fasilitas kemanusiaan.

Selain permasalahan akses, ada pula manipulasi bantuan yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang demi keuntungan sendiri, diantaranya pada tahun 1994, *Medecins Sans Frontieres* (MSF) dan *International Rescue Committee* harus menarik bantuannya karena ekstrimis Hutu memanipulasi bantuan untuk keuntungan militer. Di lain pihak, pada tahun 1996 saat Taliban menguasai Afghanistan, banyak organisasi kemanusiaan yang memutuskan bekerja sama dengan rezim yang represif agar tetap mampu mendistribusikan bantuannya (Martone 15:2002).

Terlepas dari keterkaitan antara aksi kemanusiaan dan politik, komitmen global untuk memberikan bantuan kepada mereka yang terkena dampak perang dan bencana alam menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan. *International Migration Review* mengelaborasi empat logika dibalik komitmen multilateral ini: (1) isu kemanusiaan merefleksikan standard peradaban (2) isu kemanusiaan dapat mengancam tatanan domestik dan internasional (3) forum multilateral adalah sarana yang legitimate untuk menangani masalah kemanusiaan dan (4) mekanisme multilateral mampu menjadi alat untuk berbagi beban (Barnet 123:2005).

4.1.2 Prinsip-Prinsip Aksi Kemanusiaan

Mills (1961: 2005) menjelaskan bahwa prinsip-prinsip aksi kemanusiaan sebagai berikut.

1. Humanity atau kemanusiaan adalah menekankan pada usaha untuk menghilangkan penderitaan tanpa diskriminasi.
2. Prinsip netralitas adalah mensyaratkan aksi kemanusiaan untuk tidak memihak salah satu pihak yang bertikai dalam konflik
3. Prinsip imparialitas adalah mengacu pada kerja kemanusiaan yang dilakukan tanpa diskriminasi dengan tidak mempertimbangkan identitas kewarganegaraan, kesukuan, agama, jenis kelamin, ras, dll saat menolong mereka yang membutuhkan.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian yang baik perlu mempertimbangkan cara-cara atau langkah yang dilakukan dalam melakukan riset, dimulai dari alur berpikir yang jelas, jenis penelitian yang relevan dengan disiplin ilmu, sumber data yang mendukung dan tepat sasaran. Menggunakan teknik pengumpulan data yang tepat, dan teknik analisis data yang mempengaruhi kesimpulan. Berikut metode penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini.

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian dengan metode penelitian kualitatif. Menurut Cassel dan Simon, metode kualitatif adalah sebuah metode dalam penelitian ilmu sosial yang berusaha melakukan deskripsi dan interpretasi

secara akurat makna dari gejala yang terjadi dalam konteks sosial. Metode kualitatif menitik beratkan pada proses penggalian data data yang dilakukan melalui sumber sumber tertulis dan terucap. tujuan yang ingin di capai dari penelitian kualitatif adalah berusaha untuk mendapatkan data data menyeluruh tentang situasi yang sedang di pelajari oleh peneliti (Bogdan dan Taylor 28:1975).

1.5.2 Sumber Data

Data pencarian data penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui sumber yang tidak langsung yang biasanya mengenai gambaran umum yang diperoleh dari; buku buku, media, situs situs internet serta dokumen penting terkait lainnya.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang berasal dari dokumen, seperti buku, jurnal, artikel, internet, dan fasilitas website yang terkait.

1.5.4 Teknis Analisa Data

Berbagai data yang terkumpul dan tersusun akan dilakukan analisa sesuai dengan kerangka berpikir penelitian. Secara mendalam data itu menjadi kebutuhan penting untuk melihat saling keterkaitan antara beberapa variable penting yang menjadi fokus unit analisis yang terpilih. Teknik analisis dalam penelitian kualitatif bersifat induktif, artinya semua simpulan dibentuk dari semua informasi yang diperoleh. Hasil analisis dari masing-masing data yang dideskripsikan dalam penelitian kualitatif merupakan bentuk simpulan awal atau sementara. Berdasarkan beragam simpulan sementara yang telah diverifikasi dan dilengkapi datanya,

peneliti dapat membuat satu simpulan akhir yang mantap sebagai penutup laporan penelitian (Maryono 2011:123-124).

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat gambaran mengenai keseluruhan isi skripsi, maka sistematika skripsi disusun sebelum masuk pada bagian Isi, terlebih dahulu memaparkan judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, semboyan atau motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, abstraksi, dan daftar pustaka.

Bagian Isi terdiri dari empat bab dengan rincian setiap bab adalah sebagai berikut.

Bab I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka dasar teori, metode penelitian, hipotesis (jika ada), definisi konseptual (jika ada) dan sistematika penulisan.

Bab II : GAMBARAN UMUM KRISIS KEMANUSIAAN ROHINGNYA

TAHUN 2017

Bab ini memuat deskripsi tentang gambaran umum krisis kemanusiaan yang terjadi pada Etnis Rohingya Tahun 2017. Lebih lengkapnya membahas tentang 1) latar belakang terjadinya krisis, 2) sejarah dan hubungan pemerintah Myanmar dan Etnis Rohingya, 3) konflik Rohingya dari tahun 2012 hingga 2017, 4) konflik pemerintah Myanmar terhadap Etnis Rohingya tahun 2017, 5) dan faktor penyebab terjadinya konflik Rohingya.

Bab III : AKSI KEMANUSIAAN ORMAS ISLAM INDONESIA TERHADAP KRISIS KEMANUSIAAN ROHINGNYA TAHUN 2017

Bab ini memuat deskripsi pembahasan tentang Aksi Kemanusiaan Organisasi Islam Indonesia bagi Etnis Rohingnya yang meliputi: 1). Faktor-faktor pendorong Aksi Kemanusiaan Ormas Islam Indonesia terhadap krisis kemanusiaan Rohingnya dan Bentuk-bentuk Aksi Kemanusiaan Ormas Islam Indonesia terhadap krisis kemanusiaan Rohingnya.

Bab IV : SIMPULAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat Simpulan yang merupakan pernyataan singkat dari hasil penelitian dan Saran yang dibuat berdasarkan pengalaman dan pertimbangan penulis ditujukan pada para peneliti yang ingin mengembangkan penelitian yang sudah diselesaikan.

